

PATRAWIDYA

seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya

**Hiburan Teater Tradisional
di Kota Surabaya 1950 - 1968**
Oleh : Samidi

**Situs Bimolukar sebagai Aset Pariwisata
di Kabupaten Wonosobo**
Oleh : Suwarno

**Krisis Ekonomi Praja Mangkunagaran
pada Akhir Abad ke-19**
Oleh : S. Ilmi Albiladiyah

**Orkes Keroncong di Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1945 -1980**
Oleh : Darto Harnoko

**Cerita Jaka Tole dalam Kehidupan
Masyarakat Sumenep Madura**
Oleh : Suyami

**Pendidikan Seks dalam Sastra Jawa
(Studi Terhadap Serat Kadis Saesmi)**
Oleh : Sumarno

Tradisi Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah di Blitar
Oleh : Wahjudi Pantja Sunjata

Interaksi Suku Jawa dan Madura di Surabaya
Oleh : Siti Munawaroh

Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya

- Kata Pengantar Direktur Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Pengantar Redaksi
- Daftar Isi
- Samidi - Hiburan Teater Tradisional di Kota Surabaya 1950-1968 (hal. 767 - 788).
- Suwarno - Situs Bimolukar sebagai Aset Pariwisata di Kabupaten Wonosobo (hal. 789 - 816).
- S. Ilmi Albiladiyah - Krisis Ekonomi Praja Mangkunagaran pada Akhir Abad ke-19 (hal. 817 - 856).
- Darto Harnoko - Orkes Keroncong di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945 -1980 (hal. 857 - 886).
- Suyami - Cerita Jaka Tole dalam Kehidupan Masyarakat Sumenep Madura (hal. 887 - 946).
- Sumarno - Pendidikan Seks dalam Sastra Jawa (*Studi Terhadap Serat Kadis Saresmi*) (hal. 947 - 978).
- Wahjudi Pantja Sunjata - Tradisi *Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah* di Blitar (hal. 979 - 1000).
- Siti Munawaroh - Interaksi Suku Jawa dan Madura di Surabaya (1001 - 1032).

HIBURAN TEATER TRADISIONAL DI KOTA SURABAYA 1950 - 1968

Samidi^{*)}

Abstrak

Tulisan ini membicarakan konteks sosial pertunjukan teater tradisional di kota Surabaya antara tahun 1950 - 1968. Fokus pembahasan terletak pada transformasi teater tradisional dari pertunjukan jalanan menjadi pertunjukan panggung. Kajian didasarkan pada sumber lisan dan tulisan, juga sumber sekunder lain seperti majalah dan koran sejaman. Sejak tahun 1950 mulai tampak berbagai jenis komunitas seni yang mengorganisasi seni pertunjukan. Pertunjukan dalam teater didukung oleh kelas sosial tertentu. Kelahirannya memperkuat antusiasme kelas menengah terhadap kesenian tradisional. Melalui proses komersialisasi, pertunjukan tradisional memperoleh tempat. Banyak kelompok sosial mencoba mengambil keuntungan dari perkembangan teater untuk kepentingan sosial dan politik, misalnya untuk pertunjukan amal dan mobilisasi dukungan masyarakat pada beberapa partai politik dalam pemilihan lokal. Antara tahun 1950 sampai dengan 1968 banyak komunitas seni di kota Surabaya menggabungkan diri mereka dengan partai politik. Kelompok lain yang mengambil keuntungan dari perkembangan teater ini adalah pemerintah lokal.

Kata kunci: sejarah kesenian, teater tradisional, perubahan sosial

Abstract

This article discusses the social context of traditional theater performance in Surabaya, during the period 1950 - 1968. The discussion focuses on the transformation of traditional theater from street performance to panggung performance. The study is based on oral and written sources, and such other secondary sources as magazines and newspapers. Since 1950s, began to appear various arts communities which organized art performances. Performances inside theater was supported by certain social class. The inception of these performances strengthened the enthusiasm of the middle class toward traditional art. Via this process the commercialization of traditional performance took place. Many social groups tried to take advantage from the development of the traditional theater for their own social and political interests, for instance for the charity and mobilizing of the citizenry support some political parties in local elections. From 1950-1968 many art communities in Surabaya affiliated themselves with political parties. Another group that took advantage of this development was the local government.

Keywords: art history, traditional theater, social change

I. PENDAHULUAN

Teater tradisional yang berkembang di Kota Surabaya pada pertengahan abad XX ada tiga jenis, yaitu ludruk, ketoprak, dan wayang wong. Kesenian ludruk menempati popularitas lebih tinggi dibanding dua kesenian yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tempat kelahiran, terjalannya ikatan

*) Dosen di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya

emosional, dan lakon yang diceritakan sederhana, jenaka, dan disampaikan dengan bahasa komunitas masyarakat setempat (Peacock, 2005: 4&20; Frederick, 1989: 84). Ketoprak dan wayang wong merupakan kesenian pendatang yang memiliki unsur sama, seperti cerita, nyanyi, tari, dan badut atau *lawak*. Ketoprak cenderung menekankan keindahan dan kehalusan, sedangkan wayang wong merupakan personifikasi wayang kulit.

Teater tradisional ini sengaja hadir dalam bentuk pertunjukan komersial untuk memenuhi kebutuhan hiburan atau tontonan masyarakat Kota Surabaya. Pemilihan Kota Surabaya sebagai tujuan pentas berkaitan dengan jumlah penduduknya yang besar dibanding kota-kota di sekitarnya. Secara umum tempat yang dituju untuk pentas berkaitan dengan jumlah penduduk yang memadai sebagai calon penonton. Penonton pertunjukan juga dipengaruhi oleh afiliasi perkumpulan kesenian dengan lembaga-lembaga tertentu. Partai politik dan organisasi massa selalu membutuhkan pendukung, sehingga pertunjukan diposisikan sebagai salah satu strategi untuk menghimpun massa. Hubungan ini menarik untuk diketahui karena salah satu ciri pertunjukan mampu menghimpun massa.

Pada kasus tertentu, seperti peringatan hari buruh atau ulang tahun partai pada tahun 1950-an, kolaborasi pertunjukan dan organisasi berpengaruh dalam menghadirkan jumlah penonton. Contoh yang paling jelas adalah ludruk yang difungsikan untuk menghimpun dana oleh lembaga-lembaga sosial, pemerintah, militer, dan partai politik (*SP*, 31/4/56). Tampak ada sinergi yang terbangun karena kesamaan kepentingan.

Perkembangan politik yang terjadi selama periode 1950-1968 juga berpengaruh pada akses perkumpulan kesenian untuk membangun kolaborasi dan afiliasi. Kondisi yang terjadi pada tahun 1965 berkebalikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Politik menjadi panglima pada era kepemimpinan Presiden Soekarno (orde lama). Politik dinomorsatukan dalam kehidupan bernegara, sehingga berimbas pada aktifitas kebudayaan sebagai muatan dan tempat persaingan politik. Perubahan politik yang drastis terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Kekuatan politik berada pada militer. Perlakuan yang dialami oleh perkumpulan kesenian juga berubah. Perkumpulan kesenian yang diduga memiliki hubungan dengan PKI diberangus dengan *screening* organisasi yang dilakukan oleh militer berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa penonton begitu penting bagi pertunjukan komersial dan bagaimana keterlibatan pemerintah pada seni pertunjukan tradisional.

II. Stratifikasi Sosial dan Populasi Penduduk Kota Surabaya 1950 - 1968

Sejak Belanda berkuasa di Jawa, mulai muncul stratifikasi sosial berdasarkan etnik yang sering dikenal dengan istilah diskriminasi rasial. Politik diskriminasi meluas dalam lingkup kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, bahkan terjadi di hampir semua kehidupan sosial dan lingkungan fisik (Wertheim, 1999:107). Perlakuan itu tampak dalam pelayanan, interaksi sosial, dan pemukiman yang terpisah menyesuaikan dengan golongan masyarakat. Demikian juga yang terjadi di

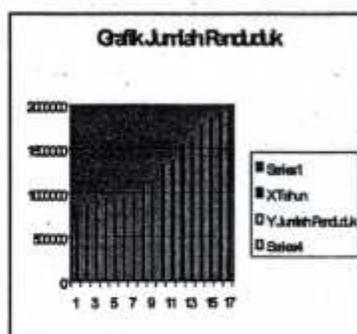
Kota Surabaya. Etnik-etnik tertentu dikelompokkan dalam satu pemukiman, seperti komunitas Belanda, China, Arab dan komunitas orang pribumi

Daerah pemukiman yang dihuni oleh sebagian besar penduduk asli Surabaya disebut *kampung*. Para penghuninya dikategorikan sebagai kelas bawah, sedangkan kelompok elite bertempat tinggal di pemukiman yang berbeda dengan kelas bawah. Kondisi ini digunakan oleh Frederick (1989: 27) untuk membedakan kelas sosial, antara lain: kelas sosial atas, menengah, dan rendah pada paruh pertama abad ke-20. Pada masa pendudukan Jepang, masyarakat Surabaya dikenalkan organisasi baru secara resmi pada tahun 1944, yaitu *tonarigumi*. Organisasi sosial ini didasarkan konsep-konsep tradisional Jepang sebagai organisasi kemasyarakatan paling bawah (Kurasawa, 1993: 195). Pada tahun 1950, organisasi ini disebut rukun tetangga atau rukun kampung yang dikenal dengan singkatan RKKS (Rukun Kampung Kota Surabaya). Penduduk kampung yang bergabung dalam keanggotaan organisasi kemasyarakatan ini dicakup dalam lingkungan masing-masing. RKKS adalah organisasi kemasyarakatan yang tugas pokoknya memelihara keamanan, perbaikan kampung secara gotong royong, dan bersifat non politik. Tetapi, pada kenyataannya RKKS telah dimanfaatkan sebagai alat memasukkan salah satu ideologi tertentu dan berusaha dibawa pada kancah politik (SR, 5&8/1/54; P, 17/5/55). Pusat RKKS secara terselubung berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia yang berfungsi menjembatani hubungan partai dengan kampung. Hal ini berkaitan juga dengan jumlah penduduk terkonsentrasi di kampung-kampung.

Data kependudukan di Kota Surabaya pada tahun 1950-1968 sangat fragmentaris. Namun, dari data yang ada dapat ditarik kesimpulan umum bahwa penduduk kota Surabaya selalu mengalami perkembangan yang cukup berarti dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan data perkembangan jumlah penduduk kota Surabaya dari tahun 1950-1968 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 1950-1968

No	Thn	Jumlah	No.	Thn	Jumlah
1	1950	714.898	10	1960	1.318.930
2	1951	855.891	11	1961	1.364.742
3	1952	921.035	12	1962	1.542.842
4	1953	925.617	13	1963	1.626.803
5	1954	926.471	14	1964	1.760.161
6	1955	935.688	15	1965	1.827.788
7	1956	980.905	16	1966	1.895.056
8	1957	1.043.283	17	1968	1.933.202
9	1958	1.135.288	-	-	-



Sumber: Diolah dari berbagai sumber¹

Dari tabel 1 kalkulasi jumlah penduduk Kota Surabaya mengalami prosentasi peningkatan yang berbeda dalam durasi lima tahunan. Pada tahun 1955 jumlah penduduk sebesar 935.688 jiwa yang mengalami peningkatan 30,9% dari tahun

¹ Data jumlah penduduk didapat antara lain dari: *Perdamaian*, 14 Januari 1952; *Terompet Masyarakat*, 1 April 1953; *Suara Rakyat*, 24 Februari 1954; *Surabaya Pos*, 26 Juni 1956, 20, 23 Maret 1957; Monography Kota Surabaya; Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk dalam Laporan walikota Surabaya tahun 1967 di Arsip Kota Surabaya.

1950, tahun 1960 sebesar 1.318.930 jiwa meningkat 40,9% dari tahun 1955, dan tahun 1965 sebesar 1.827.788 jiwa meningkat 38,5% dari tahun 1960. Komposisi penduduk terdiri dari beranekaragam etnik antara lain pribumi (Indonesia), Tionghoa, Eropa, India, Pakistan, dan lain-lain.

III. Penonton Hiburan Teater Tradisional

“Apa jang dipertoendjoeken di atas toneel susah boeat ditoetoerken dengan toelisan.....bagi siapa jang beloem pernah koenjoengi.....” (*Penjebat Semangat*, 15/12/38, No. 15/VI)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa merekonstruksi pertunjukan dalam bahasa teks tidak pernah sama dengan suasana yang terbangun dalam pertunjukan. Demikian juga dengan kegiatan menonton di masa lampau tidak bisa disamakan dengan kegiatan menonton yang terjadi pada saat ini. Komposisinya sangat berubah-ubah bersamaan dengan perubahan waktu, tempat, dan peristiwa dari setiap pertunjukan. Ini berarti setiap kali perkumpulan melakukan pertunjukan tidak akan ditonton oleh penonton yang sama dengan sebelumnya dalam situasi apapun.

Pertunjukan yang terjadi di Kota Surabaya setelah kemerdekaan dapat ditafsir dari perkumpulan dan konteks sosial penonton. Pada tahun itu, situasi politik tidak menentu karena masyarakat disibukkan oleh perang dengan Belanda yang ingin membangun kembali pemerintahan. Pertunjukan dan penonton berada pada situasi yang kurang lebih sama dengan kondisi sosial politik yang sedang berlangsung. Para anggota perkumpulan kembali ke rumah masing-masing dan ada juga yang ikut bergerilya.

Perkumpulan teater tradisional yang ada, seperti Ludruk Marhaen, Tresno Enggal, Saritomo, dan Ludruk Jawa Timur, untuk sementara melebur menjadi satu dengan nama Ludruk Sekar Mulya yang dikoordinasikan oleh ludruk Marhaen. Setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata dan pengakuan kedaulatan negara dalam bentuk RIS, situasi keamanan berangsur-angsur stabil. Perkumpulan ludruk Sekar Mulya kemudian mengalami perubahan lagi (Anonim, 1953: 854). Masing-masing perkumpulan ludruk membentuk kembali perkumpulannya. Sebagian anggota perkumpulan Ludruk Aliran Massa memisahkan diri dan membentuk Ludruk Warna Warni dipimpin oleh Sipoean dan Warna Sari dipimpin oleh Kastamin.

Untuk konsolidasi kesenian, beberapa perwakilan perkumpulan ludruk mengadakan pertemuan pada tanggal 26 Februari 1952 yang dipimpin oleh Bowo dari Marhaen. Pesertanya adalah perwakilan dari ludruk Aliran Massa, Warna Sari, Marhaen, Tresno Enggal, dan Jawa Timur. Pertemuan itu bertempat di rumah Kasian di Kampung Genteng Bandar. Kesepakatan yang dihasilkan adalah mencegah persaingan dan perebutan pemain-pemain ludruk antar perkumpulan. Dari kegiatan itu juga terbentuk organisasi ludruk yang disebut Persatuan Sandiwara Ludruk (Persalu) (*PS*, 28/2/52).

Perkumpulan pertunjukan lain dari jenis ketoprak dan wayang wong juga mulai pulih sejak berakhirnya perang kemerdekaan itu. Perkumpulan Wayang Wong

Langen Sedyo Rahayu yang dibentuk pada tahun 1948 diaktifkan kembali. Perkumpulan ini dikelola oleh R.B.S. Soeparnadi sekaligus sebagai ketua Yayasan Kesenian Indonesia di Jalan Genteng Besar 75 Surabaya. Ijin resmi bermain di jalan Kapasari Nomor 1 sebagai tempat pertunjukan permanen diajukan pada tanggal 20 April 1952 (AKS, No. 24787 Box 2041).

Sejak tahun itu Wayang Wong Langen Sedyo Rahayu melakukan pertunjukan rutin setiap malam hari selama kurang lebih dua puluh tahun, yaitu awal tahun 1950-an sampai akhir tahun 1960-an. Lakon-lakon yang dipentaskan diumumkan untuk satu minggu berikutnya melalui iklan di koran-koran lokal setiap hari Sabtu sejak tahun 1952. Dengan adanya gedung permainan ini masyarakat dapat menonton pertunjukan yang disukai setiap saat.

Klasifikasi penonton teater tradisional tidak ditentukan berdasarkan perbedaan ras, tetapi berdasarkan kemampuan keuangan seseorang untuk memilih kelas yang dikehendaki. Pemilihan ini hanya dapat dilakukan di tempat pertunjukan permanen. Para calon penonton dapat menikmati sajian pertunjukan dengan memilih tempat duduk berdasarkan kelas yang disediakan (tabel 2 dan 3). Harga karcis masing-masing perkumpulan bervariasi. Dari tabel 2 tampak harga karcis Wayang Wong Langen Sedyo Rahayu pada tahun 1953 dan 1965. Harga tertinggi sebesar Rp. 4,00 dan harga terendah sebesar Rp. 1,00. Selama 12 tahun terjadi perubahan harga karcis ratusan kali lipat. Pada bulan Agustus 1965 harga karcis paling tinggi sebesar Rp. 525,00 dan paling rendah sebesar Rp. 270,00.

Tabel 3.1 Harga Karcis Wayang Wong Langen Sedyo Rahayu Tahun 1953 dan 1965

Jenis Karcis	T a h u n		Rincian Harga Karcis Tahun 1965		
	1953 (Harga Total)	1965 (Harga Total)	Rincian Harga Karcis Tahun 1965		
			Harga	Pajak Khusus	Materai
Kelas I	Rp. 4,00	Rp. 525,00	Rp. 500,-	Rp. 15,-	Rp. 10,-
Kelas II	Rp. 3,00	Rp. 375,00	Rp. 350,-	Rp. 15,-	Rp. 10,-
Kelas III	Rp. 2,00	Rp. 270,00	Rp. 250,-	Rp. 10,-	Rp. 10,-
Kelas IV	Rp. 1,50	-	-	-	-
Kelas V	Rp. 1,00	-	-	-	-

Sumber: "Ijin Menyelenggarakan Pertunjukan wayang wong yang tetap dipersil jalan Kapasari No. 1" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 24787 Box 2041; *Surabaya Pos*, 28 Agustus 1965.

Pada bulan April 1953 harga beras antara Rp. 2,00 (mutu rendah) sampai Rp. 2,50 (mutu baik) per kilogramnya (*PS, 8, 18, & 28/4/53.*), maka untuk menikmati pertunjukan wayang wong dalam kelas tertentu dapat dikonversi berdasar harga beras tersebut. Harga karcis pada tahun 1953 kelas I setara dengan 2 kg beras. Harga karcis ini menunjukkan bahwa pertunjukan wayang wong merupakan pertunjukan mahal, apalagi jika membandingkannya dengan pertunjukan Wayang Wong Ngesti Pandowo pada tahun 1953. Harganya lebih mahal lagi, setara dengan 10 kg beras untuk harga karcis kelas I (tabel 3).

Tabel 3.2 Harga Karcis Tahun 1953, 1959, dan 1961
Wayang Wong dan Ludruk

Jenis Karcis	Wayang Wong Ngesti Pandowo		Ludruk Aliran Massa
	Juni 1953	Agustus 1959	April 1961
Kelas I	Rp. 10,00	Rp. 30,00	Rp. 10,00
Kelas II	Rp. 7,50	Rp. 20,00	Rp. 7,50
Kelas III	Rp. 5,00	Rp. 10,00	Rp. 5,00
Kelas IV	Rp. 3,50	Rp. 5,00	-
Kelas V	Rp. 2,00	-	-

Sumber: Diolah dari *Trompet Masyarakat*, 21 Mei 1953; *Perdamaian*, 10 Agustus 1959; *AKS*, No.8647 Box 133

Tabel 3 tampak harga karcis Wayang Wong Ngesti Pandowo lebih mahal dibanding Langen Sedyo Rahayu pada tahun 1953. Hal ini karena kualitas Wayang Wong Ngesti Pandowo lebih baik, selain itu permainannya hanya beberapa hari antara tanggal 27 Mei sampai 5 Juli 1953 (*TM*, 21/5/53). Harga karcis paling rendah pada perkumpulan ludruk. Peacock juga mengatakan bahwa tiket karcis menonton ludruk dijual dengan harga murah, sehingga para pemainnya juga dibayar murah (Peacock, 2005: 26).

Pertunjukan yang dilakukan di gedung permanen relatif teratur dan tertib karena penonton menikmati dengan duduk di kursi-kursi yang telah disediakan (Brata, 21/8/07). Tempat duduk penonton harus mengikuti standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Tujuannya untuk memudahkan melakukan penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran atau kekisruhan. Persyaratan pertunjukan secara umum meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, kebersihan kamar kecil, larangan merokok di ruangan, pintu harus lebar, jalan darurat, dan tempat kursi harus permanen supaya tidak dipindah-pindah (*AKS*, No. 34787 Box 2041). Persyaratan tersebut disertakan setiap perkumpulan mengajukan perijinan. Gambar 1 tampak pemain dan penonton pertunjukan wayang wong.



Gambar 1 dan 2 Pertunjukan wayang wong dan Penonton Tahun 1958

Sumber: *Surabaya Pos*, 20 Juni 1958.

Surabaya Pos, 30 Juni 1958.

Para perempuan memakai busana khas Jawa lengkap dan model rambut diikat rapi (*gelung*) dan yang laki-laki bercelana panjang dengan pakaian rapi memenuhi ruang untuk penonton (*SP*, 20/6/58). Penonton pertunjukan wayang wong cenderung

elite karena ditonton oleh orang-orang tertentu. Sebenarnya siapapun dapat menonton pertunjukan ini, hanya saja kebanyakan penonton yang datang menyesuaikan terhadap yang ditonton terutama cara berpakaian, sehingga yang tampak adalah golongan kelas menengah atau atas (Sandjaja, 23/8/07; Brata, 21/8/07). Berikut ini pernyataan salah satu penduduk Surabaya menilai teater tradisional yang ada di Surabaya tahun 1950 atau 1960-an:

“Masyarakat Surabaya lebih suka menonton ludruk daripada ketoprak atau wayang wong, ketoprak dan wayang wong ditonton oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti priyayi, ningrat, orang-orang agama. Mereka datang dengan necis-necis, ini berbeda dengan ludruk yang dihadiri oleh orang kampung.” (Sandjaja, 23/8/07)

Perbedaan derajat ini setidaknya menurut ukuran penonton, tetapi sebagai suatu perkumpulan kesenian yang menghibur semua teater tradisional sama dan selalu membutuhkan penonton. Hanya dari tampilan fisik pemain dan penonton berbeda, misalnya cara berpakaian penonton pertunjukan ludruk berbeda dengan cara berpakaian penonton wayang wong. Penonton ludruk datang dengan pakaian yang menandakan kelas bawah. Penonton memakai celana pendek atau sarung pada saat menonton, sedangkan orang-orang kelas atas di Surabaya tidak mengenakan pakaian seperti itu di muka umum (Peacock, 2005: 19).

Tempat pertunjukan penonton di depan panggung ludruk lebih gaduh dibanding penonton pertunjukan wayang wong. Suasana penonton pertunjukan ludruk sama sekali tidak rapi, selama pertunjukan para penonton ada yang makan nasi, minum kopi, minum bir, dan para penonton atau pemain bisa saling menyapa dan mengejek terutama dilakukan oleh penonton (Peacock, 2005: 31). Para penonton ludruk bereaksi manakala para pengidung waria dan pelawak tampil ataupun lakon sesungguhnya ditampilkan. Penonton selalu merespon aksi para aktor di atas panggung untuk melakukan penilaian, seperti menertawai, memuji, atau mengejeknya. Justru dari situasi ini penonton ludruk dapat terhibur.

Para peminat pertunjukan ludruk berasal dari kaum buruh atau refleksi dari para pemain, seperti kuli, pedagang kecil, peternak, dan petani. Dalam pementasannya juga menampilkan lakon-lakon anti kolonial dan tidak mencerminkan aliran keagamaan. Kebanyakan pemain ludruk adalah orang Islam yang kurang menjalankan syariat (*abangan*) dan lebih dekat pada praktek-praktek dan ajaran-ajaran kepercayaan Jawa tradisional.

Penonton lebih bebas menikmati pertunjukan ketika pertunjukan bermain di tempat seseorang yang menyewa (*menanggap*) seni pertunjukan untuk meramaikan berbagai pesta. Penonton datang dan menikmati pertunjukan dengan gratis tanpa dipungut biaya. Kursi-kursi yang tersedia khusus diperuntukkan kepada para undangan yang lebih dahulu datang. Para undangan yang datang belakangan sehingga tidak mendapatkan kursi tempat duduk bisa mengambil tempat duduk sesukanya. Demikian juga dengan orang-orang pada umumnya yang hadir menikmati pertunjukan melakukan hal yang sama karena keadaan panggung terbuka semua sisinya sehingga penonton lebih bebas dan leluasa. Ada yang berdiri dan duduk di alas tikar yang sebelumnya telah dipersiapkan (Kalsum, 12/9/07). Suasana yang tercipta di antara penonton pertunjukan ludruk tersebut jelas berbeda dengan

penonton pertunjukan wayang wong maupun ketoprak.

IV. Kepentingan Perkumpulan Teater dan Organisasi Sosial pada Pertunjukan Komersial

Bagian ini menjelaskan tentang berbagai macam pendanaan penopang perkumpulan teater tradisional. Dana perkumpulan teater tradisional diperoleh dari tiga cara utama, yaitu (1) dana dari masyarakat (swadana), disebut dukungan komunitas (*communal support*); (2) dana dari subsidi pemerintah, disebut dukungan pemerintah (*government support*); dan (3) dana dari penonton, disebut dukungan komersial (*commercial support*) (Brandon, 2003: 252). Tiga cara utama ini sebagai dasar penjelasan.

Swadana masyarakat (*communal support*) ditujukan pada jenis pertunjukan komunitas yang berkaitan dengan pertunjukan keagamaan atau keperluan upacara. Dari sini diketahui pertunjukan teater tradisional di Surabaya bukan untuk kepentingan keagamaan atau upacara, sehingga dukungan dana tidak dapat dijelaskan. Dukungan dana yang kedua adalah subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah hanya membantu sebagian kecil keuangan dari seluruh kebutuhan perkumpulan.

Penjelasan berikut ini ditekankan pada pertunjukan komersial yang memperoleh dukungan dana dari penonton (*commercial support*) melalui pertunjukan komersial. Pertunjukan komersial dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, pertunjukan non kontrak, yaitu pertunjukan yang dilakukan atas inisiatif perkumpulan melalui penjualan karcis yang dijalankan oleh perkumpulan itu sendiri. Dengan pertunjukan non kontrak, perkumpulan teater menanggung resiko kerugian keuangan apabila biaya pertunjukan tidak terpenuhi karena penontonnya sedikit. *Kedua*, pertunjukan kontrak, yaitu pertunjukan yang dilakukan karena disewa atau diborong oleh pihak lain. Dengan pertunjukan kontrak, perkumpulan teater mendapat penghasilan tetap karena ada pihak lain yang menyewa atau memborong. Namun, kedua model ini saling bergantian digunakan. Antara perkumpulan dan kelompok-kelompok sosial memiliki kepentingannya masing masing pada pertunjukan komersial ini, seperti yang tampak berikut ini.

A. Pertunjukan Non Kontrak

Pertunjukan non kontrak bertempat di gedung permanen dan semi permanen. Tempat pertunjukan semi permanen berada di lapangan terbuka yang diberi dinding pembatas sebagai penutup atau disebut pertunjukan *tobong*. Perkumpulan yang tidak memiliki tempat pertunjukan permanen selalu berpindah tempat. Tempat pertunjukan yang rutin digunakan perkumpulan ludruk sejak tahun 1951 adalah Wonokromo dan Pasar Sore. Tempat lain yang menyusul digunakan, antara lain Bangunrejo, Kapasari, Krembangan Baru (gedung BPRI), Yayasan Taman Kebudayaan, dan Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Masih banyak lagi tempat pertunjukan di lapangan kampung yang tersebar di kota Surabaya.

Bangunrejo merupakan nama kampung yang memiliki kompleks pelacuran.

Daerah ini pada awalnya berupa tempat terbuka yang digunakan oleh pemerintah kota untuk menampung para tuna wisma (gelandangan) pada tahun 1951. Bangunan tempat penampungan mengalami perubahan dari semi permanen dengan dinding anyaman bambu (*gedhek*) beratap ijuk menjadi bangunan permanen berdinding batu bata beratap genteng. Kompleks pelacuran ini terbesar di kota Surabaya dengan jumlah penghuni 1386 orang pada tahun 1958. Tempat keramaian dengan kelas-kelas sosial bawah menjadi magnet pertunjukan ludruk untuk menarik penonton. Tanah lapang di kampung ini digunakan oleh perkumpulan ludruk mengadakan pertunjukan. Penduduk kampung juga memiliki perkumpulan ludruk yang bernama Ludruk Cermin Massa (*SP*, 13/6/58).

Tempat-tempat lain yang umumnya digunakan adalah sentra hiburan, dekat pasar, pasar malam, area pelacuran, dan perkampungan yang memiliki tanah lapang. Sejak tahun 1950-an dan 1960-an, pertunjukan ludruk berlangsung semarak dan mudah ditemukan di kota Surabaya. Jumlah perkumpulan ludruk di kota Surabaya menurut catatan Kantor Jawatan Penerangan Kota Surabaya sebesar 48 perkumpulan pada tahun 1952 (*PS*, 28/2/52). Jumlah perkumpulan berkurang dari tahun ke tahun.

Tempat permanen lainnya adalah gedung di jalan Kapasari yang digunakan wayang wong Langen Sedyo Rahayu. Gedung Yayasan Taman Kebudayaan dan pertunjukan BPRI di Jalan Rajawali Nomor 81 sering digunakan untuk pentas berbagai bentuk pertunjukan. Gedung BPRI ini sudah ada sejak tahun 1953 di kampung Krembangan Baru. Secara bergantian gedung ini digunakan oleh berbagai perkumpulan untuk mengadakan pertunjukan non kontrak (*AKS*, No.74327 Box 2421). Pada tahun 1961, Taman Hiburan Rakyat (THR) menjadi pusat hiburan masyarakat yang dikelola pemerintah kota Surabaya.

Taman Hiburan Rakyat memiliki tiga tempat pertunjukan teater tradisional yang sering ditempati oleh Ludruk Sawunggaling, Wayang Wong Sri Wandowo, dan Ketoprak Sri Widodo (*AKS*, No. 79789 Box 2591). Perkumpulan teater tradisional yang lain juga memiliki kesempatan bermain di kompleks THR jika salah satu perkumpulan ini sedang dikontrak bermain di luar. Contohnya adalah Ludruk Sawunggaling yang sering mengkombinasi dengan pertunjukan. Gedung yang kosong dimanfaatkan oleh perkumpulan lain pentas di THR, seperti yang pernah dilakukan oleh ludruk Marhaen (*Sandjaja*, 23/8/07).

Di tempat-tempat itu perkumpulan melakukan pertunjukan non kontrak untuk mendanai perkumpulan. Dana itu diperoleh dari menjual karcis yang dikelola sendiri oleh perkumpulan. Hanya perkumpulan wayang wong yang relatif sangat jarang disewa oleh masyarakat secara perorangan dibandingkan dengan ludruk dalam rangka pesta atau peringatan. Jika disewa oleh perorangan seringkali hanya memainkan fragmen (*Sandjaja*, 23/8/07).

B. Pertunjukan Kontrak

Dana pertunjukan komersial yang lain diperoleh dari pertunjukan kontrak. Dari pertunjukan kontrak ini tampak jelas kepentingan perkumpulan dan kepentingan sponsor. Perkumpulan teater yang dikontrak oleh seseorang atau lembaga digunakan untuk berbagai keperluan. Waktu pertunjukan seringkali teratur berkaitan dengan

peristiwa sekuler, antara lain pekan raya atau ulang tahun kota dan peringatan hari raya nasional (*TM*, 13/6/55; *SP*, 16/8/57), ulang tahun organisasi (*SP*, 13&31/4/56), dan penggalangan dana (sekolah {*AKS*, No. Box 140}, organisasi, dan amal). Pertunjukan dalam peristiwa sekuler dijelaskan secara kronologi sesuai dengan tema yang disebutkan.

Pertunjukan yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari raya nasional berlangsung secara periodik, seperti hari pahlawan setiap tanggal 10 November dan proklamasi kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Pada peringatan hari pahlawan 10 November 1951 ditampilkan pertunjukan ludruk yang dipentaskan di depan kantor walikota Surabaya. Pada pertunjukan ini Presiden Soekarno menyempatkan hadir (*SR*, 7/10/51). Peringatan hari kemerdekaan tahun 1957 juga dimeriahkan oleh berbagai hiburan termasuk di dalamnya pertunjukan ludruk (*SP*, 16/8/57). Demikian juga pada tahun 1965 warga Kedunganyar Kecamatan Sawahan meminta bantuan kepada pemerintah kota berkaitan dengan penyelenggaraan ludruk pada malam hari tanggal 16 Agustus 1965 (*AKS*, No. 24842 Box 1187). Ini berarti bahwa pertunjukan ludruk selalu tampil di Kota Surabaya pada hari khusus tersebut. Pelaksanaannya dilakukan oleh panitia khusus peringatan atau atas inisiatif penduduk kampung. Peacock mengatakan bahwa pada hari-hari libur besar, seperti hari buruh dan kemerdekaan, banyak rombongan ludruk yang pentas bersama-sama di kampung-kampung kota Surabaya (Peacock, 2005: 4).

Pertunjukan teater tradisional untuk organisasi diselenggarakan oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pertunjukan ini bagian dari kegiatan peringatan hari buruh internasional setiap tanggal 1 Mei. Pada peringatan hari buruh 1 Mei 1955, perkumpulan Ludruk Marhaen diundang dengan menampilkan lakon Peristiwa Berdarah bertempat di gedung Yayasan Taman Kebudayaan. Lakon Peristiwa Berdarah menceritakan pemberontakan Darul Islam yang beraksi di gunung Tangkuban Perahu (*TM*, 27&29/4/55; 3/5/55). Pertunjukan Ludruk Marhaen disewa lagi pada peringatan 1 Mei 1956 (*SP*, 13 & 31/4/56). Secara periodik hari buruh diperingati dan secara periodik pula dirayakan dengan berbagai kegiatan dan pertunjukan.

Pertunjukan kontrak menggalang dana digunakan untuk tujuan pendidikan, pembiayaan organisasi, dan amal. Penggalangan dana pendidikan dilakukan oleh Panitia Balai Pendidikan, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), dan Panitia Usaha Pembangunan Sekolah Rakyat. Panitia Balai Pendidikan mengundang pertunjukan untuk mengumpulkan dana pendidikan. Pertunjukan yang dikontrak adalah Ludruk Tresno Kangen yang bermain pada tanggal 21-24 April 1956 bertempat di GNI Bubutan Surabaya. Sepertiga dari pendapatan bersih akan disalurkan untuk pendidikan melalui Panitia Balai Pendidikan (*SP*, 17/4/56).

Pertunjukan wayang wong seperti tampak pada gambar 2 diselenggarakan atas inisiatif Baperki juga untuk penggalangan dana pendidikan.



Foto 3 Pertunjukan Kontrak oleh Baperki Tahun 1958

Sumber: *Surabaya Pos*, 14 Juni 1958. (gambar kiri: sambutan, kanan: adegan, kanan: penghargaan)

Gambar 2 adalah perkumpulan Wayang Wong Ang Hien Hoo dari kota Malang. Seluruh pemainnya etnik Tionghoa. Wayang wong ini mengadakan pertunjukan selama dua malam di gedung Yayasan Taman Kebudayaan Surabaya. Pada tanggal 21 Juni 1958 pertunjukan menampilkan lakon Palguna-Palgunadi dan 22 Juni 1958 dengan lakon Mustokoweni. Selain penggalangan dana pendidikan, tujuan pertunjukan Wayang Wong Tionghoa ini adalah mengenalkan diri sebagai warga etnik Tionghoa yang peduli pada kebudayaan lokal (*SP*, 14/6/58).

Pertunjukan wayang wong untuk kepentingan pendidikan juga diselenggarakan oleh Panitia Usaha Pembangunan Sekolah Rakyat Kota Surabaya pada tanggal 6 Mei 1959. Pada tahun ini kekurangan gedung sekolah rakyat menjadi persoalan yang serius di kota Surabaya. Ketika R. Satryo Sastrodiredjo terpilih menjadi walikota Surabaya pada tahun 1958, walikota memprioritaskan masalah kekurangan gedung sekolah rakyat sebagai salah satu program utama (*SP*, 13/6/58). Atas prakarsa panitia tersebut, perkumpulan Wayang Wong Dirgahaju milik Yayasan Kebudayaan Dirgahaju pimpinan Halimah Jokosuwarno diundang pentas (*SP*, 9/3/59). Panitia juga mengundang Wayang Wong Sriwedari yang melakukan pentas secara berturut-turut pada tanggal 17 19 Mei 1959. Hasil dari pertunjukan ini seluruhnya dipakai untuk mendanai pembangunan gedung-gedung sekolah rakyat (*AKS*, No. 49178 Def 6836).

Selain digunakan untuk penggalangan dana pendidikan, pertunjukan juga menjadi tumpuan menggalang dana untuk membiayai organisasi dan keperluan amal. Persatuan Bekas Gerilya dan Angkatan Perang Republik Indonesia adalah sebuah organisasi sosial yang berusaha membiayai organisasi dengan jalan mengontrak pertunjukan ludruk. Dari kegiatan ini diketahui bahwa selisih lebih nilai kontrak dan pendapatan pertunjukan digunakan untuk keperluan organisasi itu. Perkumpulan ludruk dikontrak selama satu bulan mulai dari tanggal 11 Juni 10 Juli 1951 untuk melakukan pentas (*AKS*, No. 6818 Def 6848). Kegiatan mengontrak perkumpulan profesional untuk penggalangan dana beresiko pada pengontrak. Apabila terjadi kerugian karena minimnya penonton menjadi tanggung jawab pengontrak. Maka, pengontrak biasanya mengajukan pembebasan pembayaran pajak tontonan kepada pemerintah kota.

Pertunjukan amal dilakukan oleh ibu-ibu dari Panitia Penolong Pelajar Mahasiswa Indonesia Daerah Indonesia Tertutup (P3MDT). Pertunjukan amal

adalah pertunjukan yang bertujuan mencari dana untuk kepentingan sosial. Panitia mengundang perkumpulan wayang wong yang beranggota polisi Surabaya untuk pentas di gedung Yayasan Taman Kebudayaan Surabaya. Pertunjukan menampilkan lakon Parto Dewo. Hasil seluruhnya diserahkan kepada P3MDT Kota Besar Surabaya untuk membantu para pelajar dan mahasiswa yang dimaksudkan itu (*SP*, 17/4/56; 13/6/58).

Ketoprak juga dipakai untuk keperluan amal. Salah satunya pertunjukan Ketoprak Kridho Mardi yang bermain di Kota Surabaya selama 1 minggu (*P*, 21/7/59). Perkumpulan ini diundang dan dikontrak oleh Ikatan Bintara dan Tamtama cabang Garnisun Surabaya di area Pekan Raya Surabaya. Pendapatan digunakan membantu korban banjir (*SP*, 16 & 20/3/59).

Dari variasi pertunjukan komersial itu, kepentingan pengontrak adalah berusaha memperoleh keuntungan finansial dan kepuasan, sedangkan kepentingan perkumpulan adalah pendapatan tetap stabil. Dengan demikian, perkumpulan teater tradisional mampu bertahan dengan pertunjukan komersialnya. Kemeriahan dalam setiap pertunjukan telah menunjukkan sinergi mutualis.

V. REGULASI PEMERINTAH PADA PERTUNJUKAN

A. Memungut Pajak Tontonan

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pertunjukan komersial membentuk relasi resiprositas antara perkumpulan dan masyarakat. Relasi juga terbangun antara perkumpulan dengan lembaga negara, yang paling menonjol berhubungan dengan pajak tontonan. Pemerintah selalu memungut pajak tontonan setiap kali pertunjukan komersial diselenggarakan, sedangkan imbal-balik berupa pembinaan atau subsidi bagi perkumpulan tidak tampak dipermukaan. Pemerintah Kota Surabaya memang telah mengaturnya dalam peraturan khusus pajak tontonan. Peraturan yang berlaku tahun 1950-an ini diwarisi dari pemerintah kota sebelumnya. Hal ini diketahui dari pajak tontonan yang disampaikan oleh pemerintah kota kepada perkumpulan dan penyelenggara selalu merujuk pada peraturan pemerintah kota semasa Hindia Belanda.

Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan perkumpulan atau penyelenggara pertunjukan komersial membayar pajak tontonan sebelum pertunjukan dimulai. Pajak tontonan dikenakan pada pertunjukan komersial, yaitu pertunjukan yang diselenggarakan atas inisiatif perkumpulan itu sendiri atau di kontrak dengan maksud mencari keuntungan. Pemerintah kota mengetahui jenis pertunjukan ini dari ijin yang diajukan perkumpulan dan karcis atau tanda masuk yang tercetak harus mendapatkan pengesahan (*AKS*, No. 2003 Box 139). Satu lembar karcis harus terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian untuk penonton, penyelenggara, dan kantor dinas pajak.

Pertunjukan yang diselenggarakan pada peringatan, pesta, dan penggalangan dana yang ditujukan pada kepentingan umum dan amal tidak diwajibkan membayar pajak tontonan. Pertunjukan penggalangan dana yang dialokasikan untuk

kepentingan organisasi sosial atau penyelenggara tidak dibebaskan dari pajak tontonan.

Pertunjukan untuk kepentingan umum, antara lain pendidikan, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan kesehatan, sedangkan pertunjukan amal antara lain hasil pertunjukan digunakan untuk bantuan kemanusiaan, seperti korban bencana alam, lembaga orang cacat, pemberantasan penyakit, dan sebagainya. Pembebasan pajak tontonan pada pertunjukan-pertunjukan ini atas instruksi bersama Badan Pemerintah Harian (BPH) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Kota Surabaya. Instruksi itu juga atas anjuran yang berasal dari kementerian dalam negeri pada bulan Februari 1952 yang ditandatangani oleh kepala bagian desentralisasi Mr. Roesdiono (AKS, No. 2003 Box 139).

Pajak tontonan ini ternyata sangat membantu pendapatan pemerintah kota Surabaya. DPD Kota Surabaya yang diwakili oleh Damanhuri menerangkan bahwa pajak tontonan dan pajak (tontonan) khusus menyumbang besar pendapatan pemerintah kota. Pemerintah kota menerima pajak tontonan sebesar Rp. 9.172.671,00, (tahun 1955), kemudian Rp. 10.887.907,64 (tahun 1956). Terjadi peningkatan 9,12% pada tahun 1957 dengan jumlah Rp. 11.881.130,63 (pajak tontonan Rp. 7.630.694,13 dan pajak tontonan khusus Rp. 4.250.436,50). Pendapatan itu cukup besar apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dari pendapatan perusahaan air, pasar, pajak pembantaian (jagal), persewaan rumah, dan lain-lain pada tahun 1956 sebesar Rp. 14.064.371,60 (SR, 11/1/58). Selama tiga tahun tersebut pajak tontonan dan pajak khusus mengalami peningkatan (PS, 25/1/57). Tontonan yang populer dan bersifat rutin diselenggarakan adalah teater tradisional yang tersebar di berbagai tempat dan bioskop.

Pembebasan pajak yang biasanya diberlakukan kepada panitia amal tidak diperbolehkan lagi sejak tahun 1966. Semua pertunjukan komersial meskipun untuk tujuan amal tetap dikenakan pajak, karena panitia-panitia amal yang mengadakan pertunjukan selalu melibatkan pemerintah kota. Dengan cara seperti itu setiap pertunjukan amal tidak terbebas dari pajak tontonan (SP, 28/4/66). Pemerintah kota melalui aparat-aparatnya menindas pertunjukan liar, yaitu pertunjukan komersial yang diselenggarakan tanpa membayar pajak tontonan.

Jumlah tontonan yang banyak dengan ijin dan tak berijin, membuat bagian pengawasan umum pemerintah kota membentuk tim pengawas pertunjukan pada tanggal 19 Agustus 1967. Tim ini bertugas melakukan pengawasan melalui operasi pertunjukan bekerjasama dengan institusi di bagian pajak, kepolisian, *afdeling controleur*, dan *sectie controleur*. Bagian pajak yang semula hanya berwenang secara administratif, dilibatkan secara aktif sesuai wewenangnya untuk melakukan operasi-operasi pajak tontonan (AKS, No. 46202 Box 1833).

B. Perijinan Pertunjukan dan Pengawasan Perkumpulan Teater Tadisional

Penyelenggara pertunjukan komersial harus membayar pajak, selain itu juga diwajibkan mengurus perijinan sebelum pertunjukan dilangsungkan. Peraturan ini telah berlaku sejak lama, pada tanggal 6 Februari 1957 waktu perijinan dibatasi selambat-lambatnya 4 x 24 jam sebelum diadakan pertunjukan. Prosedur ijin

pertunjukan ditujukan kepada kepala kepolisian Kota Besar Surabaya dengan menyebutkan secara jelas tempat dan waktu pertunjukan (*PS*, 6/2/57). Selanjutnya penyelenggara harus menginformasikan kepada bagian pajak, pengawasan umum, dan jawatan penerangan Kota Surabaya, dan pihak militer.

Kepolisian Kota Surabaya juga mencantumkan syarat-syarat umum penyelenggaraan pertunjukan. Pada tahun 1957 sampai 1965 pertunjukan yang diselenggarakan tidak mengandung maksud politik atau yang dapat mengganggu tata tertib bersama (*AKS*, No. 8627 Def8365). Tidak ada keterangan tentang maksud tidak mengandung maksud politik. Persyaratan ini tidak sejalan dengan keadaan politik dan seni pertunjukan pada tahun 1950-an sampai 1965. Justru melalui pertunjukan inilah pesan-pesan sponsor disampaikan kepada penonton.

Pada awal tahun 1950-an, setiap orang atau kelompok sangat memungkinkan untuk membentuk organisasi politik, sosial, maupun kebudayaan. Bahkan, antar organisasi yang berlainan saling bekerjasama dan melengkapi. Partai politik dapat berhubungan atau membentuk sendiri organisasi sosial dan kebudayaan. Misalnya, PKI dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Organisasi kebudayaan ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 atas inisiatif D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto, sedangkan Lekra cabang Surabaya didirikan pada tahun 1951 (Ismail, 1972: 9). Organisasi kebudayaan yang paling awal ini aktif melakukan kegiatan kebudayaan dan dalam perkembangannya dikenal sebagai perpanjangan partai politik dari PKI.

Aktifitas PKI dan organisasi massanya juga sering melakukan kegiatan langsung yang menarik minat masyarakat. Seperti pada peringatan ulang tahun PKI yang ke-35 dirayakan selama 6 hari dari tanggal 23-28 Mei 1955. Peringatan ulang tahun ini menggunakan istilah pesta rakyat yang berisi pementasan kesenian rakyat dan ceramah-ceramah (*P*, 17/5/55). Tidak ada keterangan yang menyebutkan jenis kesenian rakyat yang dimaksud, tetapi menilik dari relasinya dengan kesenian rakyat di Surabaya, pentas ludruk tidak terlewatkan.

Teater tradisional juga membentuk organisasi kesenian tradisional dari satu *genre*. Organisasi yang populer adalah Badan Kontak Ketoprak Seluruh Indonesia (BAKOKSI) dan Lembaga Ludruk. BAKOKSI didirikan pada tahun 1957 yang diketuai oleh Sudjadi sekaligus pimpinan Ketoprak Kridho Mardi. Kota Yogyakarta sebagai pusat organisasinya. Sampai tahun 1959 jumlah anggotanya sebesar 305 perkumpulan ketoprak di seluruh Indonesia. BAKOKSI juga memiliki laboratorium ketoprak yang fungsinya menyiapkan dan mengolah cerita ketoprak. Cerita yang dihasilkan dari laboratorium ini disampaikan kepada anggota BAKOKSI untuk dipentaskan, misalnya lakon Sam Pek Ing Tay (*P*, 28/7/1959).

Ketoprak Kridho Mardi Yogyakarta memiliki ikatan kuat dengan organisasi ini sekaligus perkumpulan yang besar dan terkenal di Jawa pada tahun 1950-an. Penggemar di Yogyakarta yang ingin mencoba permainan ketoprak dapat belajar di perkumpulan ini. Menurut laporan umum yang disampaikan oleh Joebaar Ajoeb pada Pleno Pimpinan Pusat Lekra, disebutkan bahwa jumlah organisasi ketoprak yang telah menjadi anggota BAKOKSI lebih dari 800 perkumpulan pada tahun 1961 (Laporan Kebudayaan Rakyat II, hlm. 94).

Lembaga Ludruk memiliki puluhan bahkan ratusan anggota perkumpulan ludruk. Dari sekian banyak perkumpulan diketahui bahwa Ludruk Marhaen yang menonjol dan memiliki hubungan faksional dengan partai. Ludruk Marhaen dibentuk sebagai bagian kesenian drama dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) pada tahun 1945. Secara organisatoris Ludruk Marhaen tidak memiliki ikatan langsung dengan Lekra maupun PKI atau bukan bagian dari struktur PKI, tetapi ada anggota perkumpulan ludruk yang memiliki hubungan dengan organisasi politik ini (Peacock, 2005: 39).

Pertunjukan yang menunjukkan hubungan itu adalah pertunjukan Ludruk Marhaen di Gedung Nasional Indonesia pada tahun 1961. Tema lakon pertunjukan berjudul *Tebu Pait*. Sponsornya adalah PKI cabang Jawa Timur, Pemuda Rakyat, dan SOBSI. Panggung pertunjukan didekorasi dengan bunga-bunga dan gambar palu arit yang besar (Peacock, 2005: 40). Meskipun kejadian seperti ini menunjukkan adanya hubungan faksional, tetapi yang sangat tampak adalah hubungan yang saling menguntungkan terutama bagi pertunjukan komersial seperti Ludruk Marhaen itu. Simbol-simbol partai tidak merepresentasikan bahwa Ludruk Marhaen adalah bagian PKI. Pertunjukan ludruk yang menyampaikan pesan-pesan verbal merupakan sesuatu yang lumrah sebab orientasi pertunjukan komersial adalah keuntungan. Apalagi dalam Kongres Nasional I Lembaga Kebudayaan Rakyat disebutkan mengenai pentingnya mengadakan hubungan antar organisasi massa dan organisasi kebudayaan (Lap. Kebud. Rakyat I, h. 79).

Lembaga Ludruk seperti halnya BAKOKSI sebagai organisasi yang memiliki kaitan tidak langsung dengan PKI. Sebelum organisasi ini dibentuk, para tokoh kesenian ludruk telah mengaggas pentingnya kesenian ludruk. Realisasinya diadakan Seminar Ludruk yang diketuai oleh Roemambi. Seminar diselenggarakan pada tanggal 25-27 Desember 1960 di Balai Pemuda Surabaya. Para pemakalah antara lain Lesmanadewa Poerbokoesoemo, Mr. B.R.M Hapsoro, dan J. Sjamsuddin yang didiskusikan semua peserta yang hadir (*TM*, 17/12/60; *JP*, 27/12/60; *P*, 4/1/61). Selanjutnya muncul gagasan membentuk suatu badan atau organisasi ludruk yang bertugas mengkoordinasi ludruk untuk mewujudkan rencana Kongres Ludruk. Berdasarkan hal itu dibentuk Biro Penghubung Ludruk untuk Kongres Ludruk yang pengurusnya terdiri dari perwakilan-perwakilan Ludruk Marhaen, Ludruk Massa, Ludruk Aliran Massa, dan Ludruk Tresno Enggal (*P*, 20/1/61).

Pada tanggal 8 Juli 1963, organisasi ludruk dengan nama Lembaga Ludruk dibentuk yang bermarkas di Surabaya (*SP*, 27/7/64). Ada sekitar 30 perkumpulan ludruk amatir dan profesional tergabung dalam organisasi ini (Brandon, 2003: 287). Pada tahun 1964 anggota Lembaga Ludruk mencapai anggota 200 perkumpulan ludruk. Tokoh penting Ludruk Marhaen adalah Bowo yang digantikan oleh J. Sjamsuddin pertengahan tahun 1964, setelah Bowo meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada bulan Mei 1964 (*SP*, 27/7/64).

Sebagai penghormatan kepada Bowo, Ludruk Marhaen mendirikan Yayasan Cak Bowo. Kemudian J. Sjamsuddin sebagai pimpinan perkumpulan dan Lembaga Ludruk mengaggas berdirinya Akademi Ludruk Surabaya pada tahun 1965 bagian dari Yayasan Cak Bowo. Tidak ada petunjuk yang mengarah pada realisasi gagasan

ini apalagi setelah tahun 1965 seluruh perkumpulan dikendalikan oleh pemerintah terutama dari keterkaitannya dengan PKI. Kegiatan Lembaga Ludruk yang lain menyelenggarakan konferensi (seminar) pada tanggal 30 Juli 1 Agustus 1964 untuk mengawali Kongres Ludruk tahun 1965. Seminar ini dikemas seperti seminar ludruk yang menampilkan berbagai pembicara membahas tentang ludruk pada tanggal 25 27 Desember 1960 di Balai Pemuda (*SP*, 27/7/64; Peacock, 2005: 37).

Kongres Nasional Ludruk I diadakan di gedung Balai Pemuda Surabaya pada tanggal 12 16 Juli 1965. Peserta kongres terdiri dari perwakilan-perwakilan 700 perkumpulan ludruk yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, antar lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Makassar, Sumatera Utara, dan Lampung. Angka yang ditampilkan dapat diragukan karena angka tersebut diberitakan pada hari Sabtu, 10 Juli 1965 sebelum pembukaan kongres pada hari Senin, 12 Juli 1965. Angka itu juga bertentangan terlalu besar dengan jumlah Lembaga Ludruk sebesar 200 perkumpulan pada tahun 1964. Kongres Nasional ini adalah Kongres yang pertama dan terakhir (*SP*, 10&13/7/65). Kesepakatan yang dihasilkan dari kongres ini adalah terbentuknya Persatuan Ludruk seluruh Indonesia (Perlindo) dengan pusat organisasinya di Surabaya dan ketua yang terpilih J. Sjamsuddin (Ludruk Marhaen) dan Abdulmanap sebagai wakil ketua (*SP*, 17/7/65).

Organisasi ini (BAKOKSI dan Lembaga Ludruk) yang ditujukan untuk kemajuan seni pertunjukan ini lenyap setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dengan sendirinya para anggota tidak lagi memiliki keberanian berkecimpung di organisasi ini setelah dituduh terlibat dengan PKI. Polemik politik di Jakarta itu berpengaruh pada perkumpulan-perkumpulan seni pertunjukan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai representasi negara berusaha mendaftar dan mengontrol setiap perkumpulan seni pertunjukan tradisional (*AKS*, No. 24817 Box 1187; No. 20274 Box 988).

Pada tanggal 2 Oktober 1965, kepala Inspeksi Daerah Kebudayaan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dep. P.D. dan K.) Jawa Timur menginstruksikan kepada kepala inspeksi daerah kebudayaan di tingkat kabupaten dan kotapraja bekerjasama dengan bupati, walikota, dan komando militer untuk mendata semua perkumpulan seni pertunjukan di wilayah masing-masing. Perkumpulan dianggap dan diakui sah apabila memiliki nomor induk yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Nomor induk ini ditetapkan sebagai persyaratan memperoleh ijin dari kepolisian saat melakukan pertunjukan. Perkumpulan seni pertunjukan yang tidak memiliki nomor induk secara otomatis ilegal dan tidak akan mendapat ijin dari kepolisian untuk melakukan pertunjukan. Apabila perkumpulan yang tidak memiliki nomor induk tetap melakukan pentas, maka pertunjukan tersebut dianggap liar. Pemerintah kota (negara) berhak membubarkan pentas yang diselenggarakan atau membubarkan perkumpulan tersebut (*AKS*, No. 24817 Box 1187; No. 20274 Box 988).

Agenda yang lebih sistematis mulai dijalankan pada tanggal 29 Desember 1965. Kepala Kantor Dep. P. D. dan K., R. Moeliono Soerjopramono mengundang rapat kepada para pejabat di dinas sipil dan militer yang berada di Kota Surabaya. Rapat

dilaksanakan di kantor Inspeksi Daerah Kebudayaan Dep. P.D. dan K Jalan Taman Mayangkara Nomor 6 pada tanggal 11 Januari 1966. Agenda rapat berisi tentang pembersihan atau pengganyangan perkumpulan seni pertunjukan dan karya-karya seni yang berkaitan dengan PKI (Gerakan 30 September 1965) dan melakukan menertibkan dan membina kesenian (AKS, Nomor 8628 Def8365).

Kantor Inspeksi Daerah Kebudayaan Dep. P. D. dan K dan Daerah Militer VIII Brawijaya bekerjasama yang isinya mendoktrin terhadap seniman, pengurus, dan anggota organisasi kesenian yang tidak terlibat dengan *gestapu*, anggota senat dan seksi kesenian mahasiswa. Dari semua bentuk kerjasama itu, salah satu cara yang efektif dan mampu menjangkau sasaran masyarakat umum adalah diselenggarakan pentas ludruk keliling di Kota Surabaya (AKS, No. 8628 Def8365).

Nomor induk perkumpulan tidak hanya dipakai sebagai persyaratan ijin, tetapi juga dipakai sebagai alat kontrol menyeleksi afiliasi atau perpanjangan partai politik. Kebijakan ini dengan sendirinya memberangus perkumpulan teater tradisional dan sengaja ditujukan kepada perkumpulan yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada saat perkumpulan mengajukan ijin pertunjukan harus memberikan penjelasan tentang lakon yang akan dimainkan, isi dari drama yang dimainkan, jenis-jenis lagu, dan lain-lain. Ketika proses ini berlangsung penjelasan dan pengarahan diberikan oleh Kantor Inspeksi Daerah Kebudayaan maupun kantor-kantor pembantu yang mewakilinya sampai di tingkat kecamatan. Apabila perkumpulan pertunjukan tersebut dapat menyesuaikan dan mengikuti penjelasan tersebut, maka ijin diberikan (AKS, No. 73624 Box 2405).

Perkumpulan yang terlibat dideteksi melalui organisasi kebudayaan yang memayungi perkumpulan kesenian tersebut, seperti LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), Lesbumi, Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), dan lain-lain. Setiap perkumpulan ketika mendaftar untuk mendapat nomor induk harus mengisi daftar isian yang salah satu butirnya berisi afiliasinya dengan organisasi kebudayaan.

Pengawasan terus dilakukan oleh walikota Surabaya bekerjasama dengan militer. Walikota Soekotjo mengirim surat tertanggal 2 Maret 1958 yang ditujukan kepada komandan Korem 084 sebagai pembina orde baru Kota Surabaya. Isi surat mengenai rencana mengumpulkan seluruh pengurus organisasi kesenian yang telah terdaftar sebanyak kurang lebih 345 organisasi yang diselenggarakan pada pertengahan bulan April 1968. Istilah yang digunakan adalah pengordebaruan organisasi kesenian (AKS, No. 74328 Box 2421).

VI. PENUTUP

Masa kejayaan teater tradisional berlangsung pada saat memasuki tahun 1950-an sampai tahun 1960-an yang ditandai oleh aktifitas pertunjukan berlangsung secara berkesinambungan dengan waktu pertunjukan yang teratur di hari-hari penting masyarakat. Perkumpulan kesenian juga memiliki inisiatif untuk mengadakan pertunjukan sesuai yang diinginkannya, sehingga pertunjukan sebagai alternatif hiburan masyarakat Kota Surabaya.

Pada masa kejayaan teater tradisional ini diketahui bahwa teater tradisional tidak dapat berdiri sendiri hanya sebagai organisasi yang menawarkan hiburan. Faktor eksternal, seperti stabilitas, perubahan sosial dan politik, berpengaruh pada pembentukan jejaringnya dengan masyarakat. Pengaruh eksternal yang positif membantu mengembangkan dan membangun kerjasama dengan teater tradisional. Dari proses ini berhasil menempatkan teater tradisional sebagai hiburan pilihan masyarakat dan sebagai media sosial. Secara garis besar, pengaruh yang dimaksud dapat diketahui dalam bagian berikut ini.

Pertama, pengaruh keamanan pada pertunjukan teater tradisional. Keamanan yang tidak terjamin berimplikasi pada kehadiran penonton. Perkumpulan kesenian yang tetap mengadakan pertunjukan pada situasi tidak stabil atau yang paling ekstrem pada saat peperangan, secara otomatis mengurangi minat penonton atau bahkan tidak dihadiri oleh penonton pada saat pentas.

Kedua, pengaruh penentuan pilihan pada pertunjukan teater tradisional. Pengaruh ini terjadi secara kuat pada saat hiburan yang berbasis kebersamaan massa masih terjaga dan ikatan emosional massa pada teater tradisional masih terjalin. Secara implisit setiap orang secara tak sadar mengidentifikasi dirinya berdasar pada hiburan yang dipilih, sehingga terbentuk kelompok semu pencinta ludruk, ketoprak, dan wayang wong. Dari kelompok-kelompok ini terjalin ikatan tak langsung yang berpengaruh pada setiap pertunjukan teater tradisional. Apabila orientasi masyarakat pada teater tradisional belum memudar, maka kontinuitas dan improvisasi teater tradisional tetap terjaga.

Ketiga, pengaruh kebebasan politik dan organisasi sosial pada teater tradisional. Ketertarikan organisasi politik termasuk organisasi sayapnya dan organisasi sosial pada teater tradisional berlangsung ketika pertunjukan teater tradisional memiliki kemampuan menghimpun massa. Realitas dari pengaruh ini ditunjukkan dari terbangunnya kolaborasi yang saling menguntungkan antara perkumpulan teater tradisional dengan organisasi politik maupun sosial. Kekuatan teater tradisional ini digunakan oleh organisasi politik untuk menarik simpati dan dukungan para penonton pertunjukan teater tradisional. Organisasi sosial juga memfungsikan kekuatan teater tradisional untuk kepentingan praktis, khususnya dalam hal pengumpulan dana. Model pertunjukan seperti ini yang disebut pertunjukan kontrak.

Perkumpulan kesenian yang berhasil membangun jaringan dalam model pertunjukan kontrak memperoleh satu kepastian yaitu keuntungan tetap. Sebaliknya, model pertunjukan non kontrak tidak memberikan kepastian keuntungan pada perkumpulan teater tradisional karena model ini tergantung pada penonton. Model pertunjukan apapun memberi manfaat pada penonton. Manfaat pertunjukan yang dirasakan penonton adalah fungsi sosial pertunjukan dalam bentuk hiburan kolektif, komunikasi, dan interaksi. Jadi, pada tahun 1950-an dan 1960-an ada banyak elemen yang membutuhkan teater tradisional.

Keempat, teater tradisional dapat dimanfaatkan dan dilemahkan oleh pemerintah. Pemerintah mengambil keuntungan dari pajak tontonan yang diwajibkan pada pertunjukan komersial. Kewajiban ini tidak berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup perkumpulan dengan syarat setiap pertunjukan selalu dihadiri

oleh penonton. Kelangsungan hidup perkumpulan terganggu ketika pemerintah melakukan pelarangan pada perkumpulan teater tradisional yang diduga menjadi bagian dari organisasi terlarang (Partai Komunis Indonesia). Penilaiannya didasarkan pada hubungan kedekatan perkumpulan kesenian dengan PKI. Pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perkumpulan teater tradisional hanya sebatas permukaan, sedangkan kualitas hubungan perkumpulan dan partai tidak diketahui. Apalagi organisasi profesi teater tradisional yang tujuannya jelas untuk mengembangkan kesenian tradisional menjadi korban kebijakan. Pengaturan pemerintah yang memihak pada ranah seni menghentikan kreatifitas kesenian.

Kelima, pada periode antara 1950-1968 teater tradisional mengalami peningkatan secara kuantitas maupun kualitas di Kota Surabaya sehingga kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) diadaptasi oleh teater tradisional yang berlangsung dari tahun ke tahun dalam periode tersebut. Pada periode selanjutnya teater tradisional mengalami penurunan (*decline*) bahkan semakin ke arah kontemporer teater tradisional sangat memungkinkan mengalami keberhentian atau kematian (*discontinuity*). Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkumpulan teater tradisional dan frekuensi pentas yang menurun. Masyarakat nampaknya juga telah mengalami disorientasi pada teater tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.

t.t. *Laporan Kebudayaan Rakyat I dan II*. Bagian Penerbitan Lembaga Kebudayaan Rakyat.

Anonim.

1953 *Propinsi Jawa Timur 1950* (Surabaya: Jawatan Penerangan RI Propinsi Jawa Timur.

Arsip Kota Surabaya, Nomor Box 140.

Arsip Kota Surabaya, Nomor 8627 Def 8365; Nomor 49628 Def 8366; Nomor 41021 Def 8366.

Frederick, W.H

1989 *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926 1946)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

"Inspeksi Daerah Kebudayaan Perwakilan Jawa Timur" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 24817 Box 1187; Nomor 20274 Box 988.

"Inspeksi Daerah Kebudayaan Perwakilan Jawa Timur" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 24817 Box 1187; Nomor 20274 Box 988.

Ismail, Y

1972 *Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kejatuhan Lekra di Indonesia*. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

"Kerjasama Kantor Inspeksi P. D. dan K dengan Dam VIII Brawijaya" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 8628 Definitif 8365.

"Kutipan Surat Ijin yang Dikeluarkan oleh Kepala Polisi Kota Besar Surabaya"

Kurasawa, Aiko

1993 *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942- 1945*. terj. Hermawan Sulistyو. Jakarta: Grasindo.

"Laporan tentang Gedung di Jalan Rajawali No. 81," *Arsip Kota Surabaya* Nomor 74327 Box 2421.

"Laporan Kegiatan Pertunjukan Rutin THR" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 79789 Box 2591.

"Lembaran Kotapradja Surabaya" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 49178 Def 6836.

"Lembaran Kota Besar Surabaya Nomor 1 89 Tahun 1951" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 6818 Def 6848.

"Lembaran Kota Besar Surabaya Nomor 1 62 Tahun 1952" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 2003 Box 139 Def 6854 butir 3.

"Lembaran Kota Besar Surabaya Nomor 1 62 Tahun 1952", hlm. 37, *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 2003 Box 139 Def 6854 butir 1 dan 4.

"Mencegah Bahaya dalam Gedung Pertunjukan" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 34787 Box 2041.

Peacock, J. L

2005 *Ritus Modernisasi: Aspek Sosial dan Simbolik Teater Rakyat Indonesia*. Jakarta: Desantara.

"Pelaksanaan Surat Advis Dirjen Kebudayaan Jawa Timur" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 73624 Box 2405.

"Pengawasan Tontonan" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 46202 Box 1833.

"Permohonan Sumbangan untuk Penyelenggaraan Kesenian Ludruk," *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 24842 Box 1187.

"Perihal Permintaan untuk Mengisi Acara dalam Rangka Orde Baru Organisasi-Organisasi Kesenian" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 74328 Definitif 8267 Box 2421.

"Rapat Penganyangan Kesenian Gestapu" *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 8628 Definitif 8365.

"SMA Trimurti memborong pertunjukan ludruk di THR pada 7-9 April 1962".

Wertheim, W.F

1999 *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. terj. M.Z. Ellizabet. Yogyakarta: Tiara Wacana.